



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT

LAPORAN KINERJA 2025



OUR CONTACT:

 KESBANGPOL.TANAHLAUTKAB.GO.ID/

 KESBANG.TALA@GMAIL.COM

 BAKESBANGPOL TANAH LAUT

 BAKESBANGPOL_TALA

#bangga
melayani
bangsa
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata Kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel (*good governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja digunakan dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap Instansi Pemerintah.

Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban

dan sebagai perwujudan kewajiban unit kerja untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu Laporan Kinerja disusun sebagai media pertanggungjawaban Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati dan masyarakat serta pihak lain yang berkepentingan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sesuai dengan tuntutan masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja (LKj) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKj tahun 2025 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2025.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi Pemerintah Daerah.
- e. Sebagai bahan laporan Kinerja Pimpinan.

Tujuan penyusunan dan penyampaian LKj adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta anggaran.

- c. Upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di masa yang akan datang

C. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2025 berlandaskan pada peraturan perundang undangan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun aturan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Laut;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi SAKIP.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 43 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.


D. Cascading Kinerja



Cascading kinerja adalah proses menurunkan (menerjemahkan) tujuan dan indikator kinerja dari level yang lebih tinggi ke level yang lebih rendah secara sistematis, sehingga setiap unit kerja dan pegawai memiliki target yang selaras dengan tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada lampiran.

E. Proses Bisnis, Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

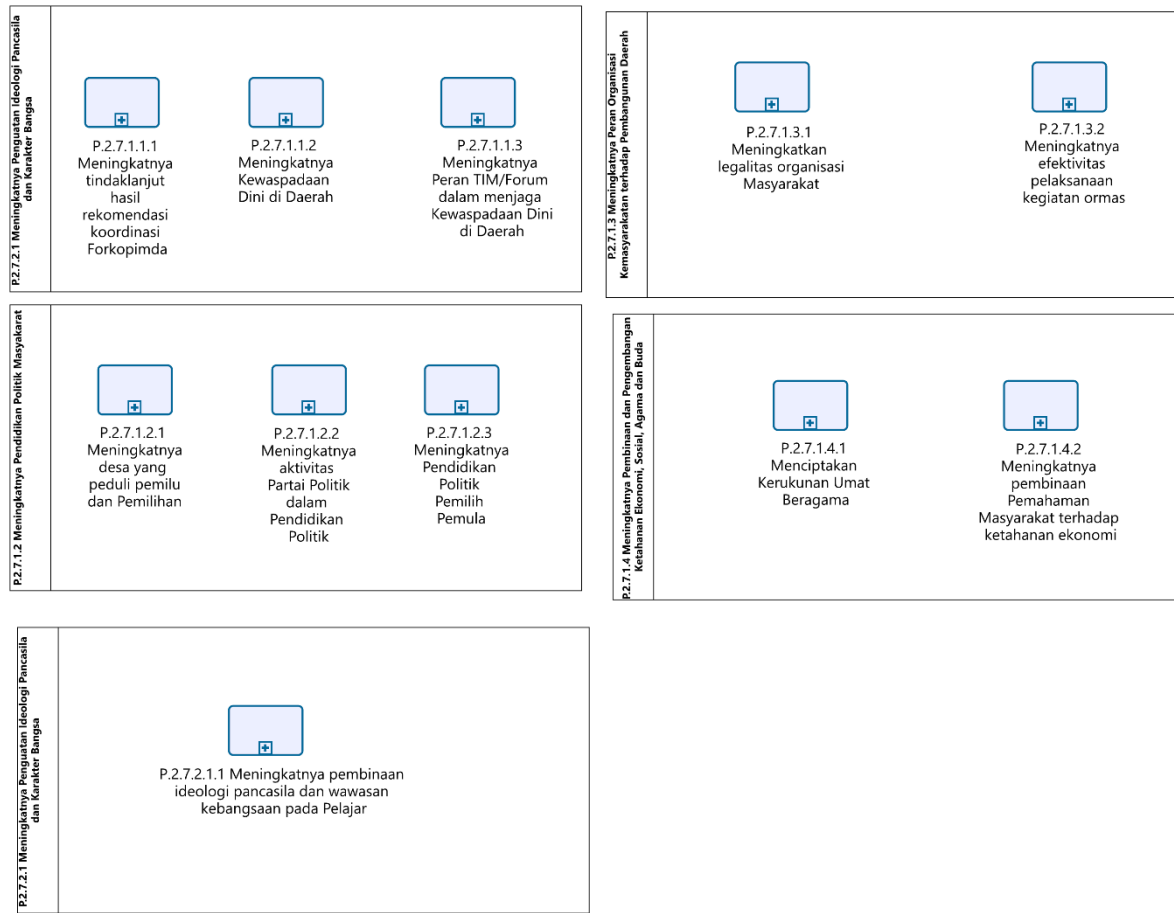
1) Proses Bisnis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menyusun Peta Proses Bisnis berdasarkan PermenpanRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah dengan gambaran sebagai berikut:

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	 <p>P.2 Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Berdaya Saing, Kompeten, dan Madani</p>
-----------------------------------	---

P.2 Meningkatkan Kualitas SDM yang Unggul, Berdaya Saing, Kompeten, dan Madani	 <p>P.2.7.1 Meningkatkan nilai keagamaan yang toleran dan berbudaya lokal</p>	 <p>P.2.7.2 Peningkatan ideologi dan Pemahaman Karakter Kebangsaan</p>
--	--	--

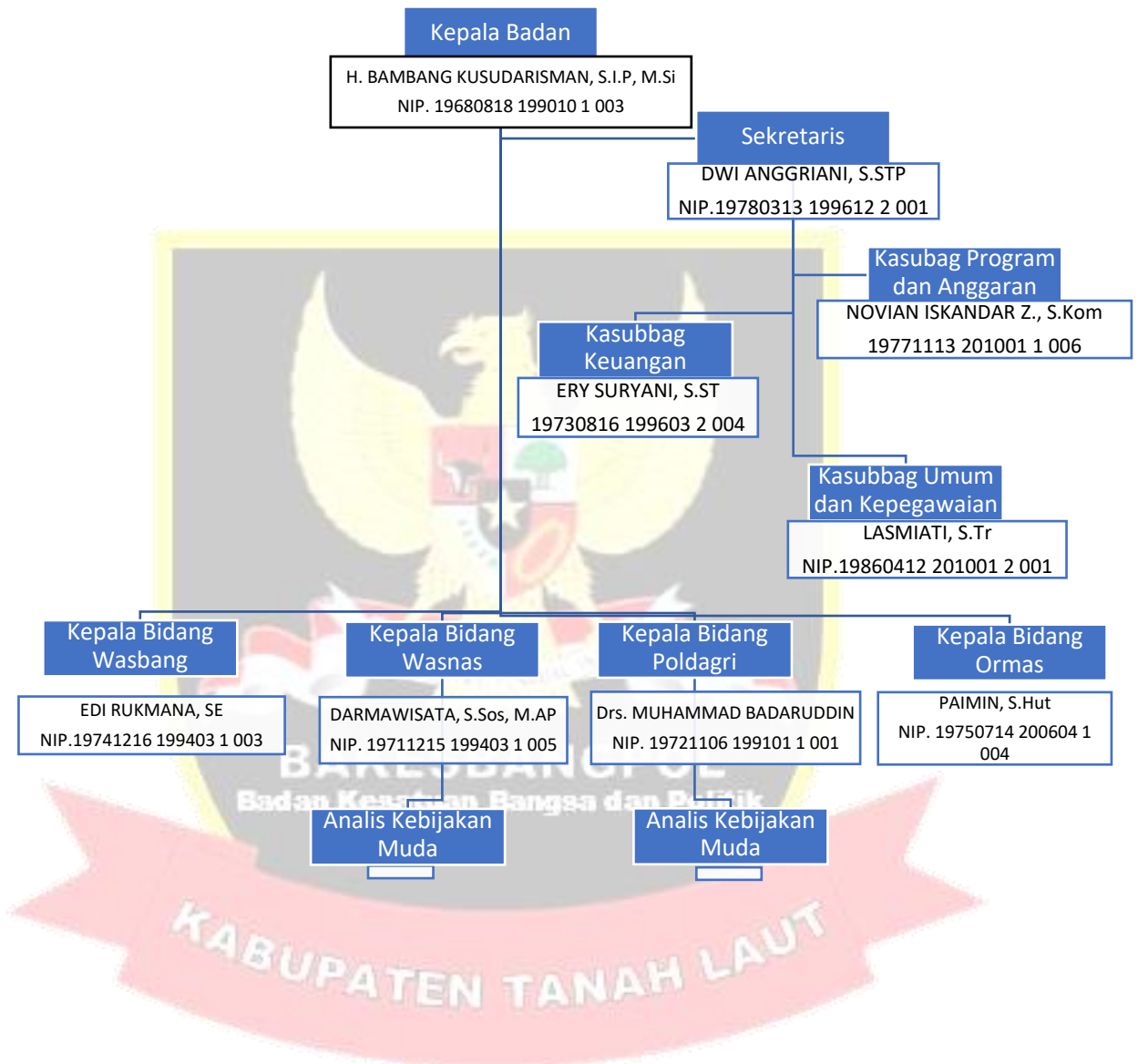




Gambar 1. Peta proses bisnis level 0-3 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2) Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Laut dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.4
 Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kabupaten Tanah Laut

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum. Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dijabarkan ke dalam tugas dan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yakni:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah.
 - a. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:
 - 1) perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2) pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 3) pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 4) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,

penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- 5) pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah
- 6) pelaksanaan administrasi Bakesbangpol
- 7) pembinaan UPTD Badan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana mempunyai tugas mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Bakesbangpol.

a. Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Bakesbangpol
- 2) pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Bakesbangpol
- 3) pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Bakesbangpol
- 4) pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Bakesbangpol
- 5) pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Bakesbangpol
- 6) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
- 7) pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Bakesbangpol

- 8) pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan
- 9) pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya dan
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sub Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran
- 2) pengelolaan data dan informasi
- 3) pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan
- 4) penyusunan laporan kinerja

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan:

- 1) pengelolaan keuangan
- 2) penatausahaan
- 3) akuntansi
- 4) verifikasi; dan
- 5) pembukuan.

4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

- 1) urusan persuratan
- 2) tata usaha pimpinan
- 3) kearsipan
- 4) hubungan masyarakat
- 5) protokol
- 6) perlengkapan dan rumah tangga aset
- 7) pengelolaan kepegawaian.

5. Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa
Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.

a. Untuk melaksanakan tugas bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah
- 2) perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah
- 4) pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 7) pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

6. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan sebagian tugas Bakesbangpol di bidang pendidikan politik, etika budaya politik
- 2) peningkatan demokrasi

- 3) fasilitasi kelembagaan pemerintahan
- 4) perwakilan dan partai politik
- 5) pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah dan
- 6) pemantauan situasi politik.

a. Untuk melaksanakan tugas bidang politik dalam negeri mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
- 2) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah
- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah
- 4) pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi
- 6) fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah; dan
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

7. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Masyarakat

Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Masyarakat mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan sebagian tugas Bakesbangpol di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya
 - 2) fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba
 - 3) fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
 - 4) pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.
- a. Untuk melaksanakan tugas bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya, agama, dan organisasi masyarakat mempunyai fungsi:
- 1) penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah;
 - 2) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah
 - 3) pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah

- 4) pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di Daerah
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

8. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas:

- 1) melaksanakan sebagian tugas Bakesbangpol di bidang kewaspadaan dini
- 2) kerjasama intelijen
- 3) pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing
- 4) kewaspadaan perbatasan antar negara
- 5) fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan; dan
- 6) penanganan konflik di Daerah.

a. Untuk melaksanakan tugas bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
- 2) penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang

asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;

- 3) pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
- 4) pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, Kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
- 5) pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah
- 6) pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah
- 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis.

1. Radikalisasi dan Terorisme

Mencegah penyebaran ideologi radikal dan terorisme menjadi isu penting, mengingat tantangan terhadap ideologi negara dan upaya memecah belah kesatuan bangsa. Oleh karena itu penting bagi Badan

Kesbangpol bersinergi bersama instansi vertikal dalam menjaring informasi intelijen untuk mencegah potensi radikalisme dan terorisme di masyarakat. Sinergitas Forkopimda juga sangat penting dalam menjaga stabilitas serta menciptakan situasi yang aman dalam mencegah radikalisme dan terorisme

2. Tantangan Multikulturalisme

Tanah Laut umumnya merupakan kabupaten dengan keberagaman etnis, agama, dan budaya. Isu terkait dengan toleransi antar kelompok dan menjaga kerukunan sosial menjadi sangat strategis dalam menjaga kesatuan bangsa. Pemahaman tentang ideologi Pancasila dan 4 pilar sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

3. Polarisasi Sosial dan Politik

Perbedaan pandangan politik yang semakin tajam di masyarakat dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik. Isu ini penting untuk dikelola agar tidak berkembang menjadi konflik yang merusak kesatuan bangsa di Tanah Laut. Pentingnya Pendidikan Politik di masyarakat sangat penting untuk menciptakan warga negara yang sadar, kritis, dan aktif dalam proses politik.

4. Pengaruh Global dan Transnasional

Globalisasi dan interaksi internasional membawa pengaruh besar terhadap politik dalam negeri. Pengaruh luar seperti aliran ideologi asing, organisasi internasional, atau tekanan global harus dihadapi dengan bijaksana. Rendahnya apresiasi dan minat generasi muda terhadap seni budaya lokal, berbanding terbalik dengan maraknya budaya asing.

5. Penguatan Demokrasi

Peningkatan kualitas demokrasi tetap menjadi isu strategis dalam memastikan partisipasi politik yang luas, adil, dan transparan. Penguatan partisipasi politik melalui pendidikan politik yang lebih baik dan dorongan untuk lebih aktif dalam pemilu sangat penting agar demokrasi bisa berfungsi secara maksimal.

6. Penanganan Konflik

Konflik yang muncul terkait dengan pengelolaan sumber daya alam, seperti sengketa lahan dan kerusakan lingkungan, dapat mempengaruhi stabilitas politik dan social di masyarakat.

7. Pemilu dan Integritas Sistem Politik

Menjaga integritas dan kredibilitas pemilihan umum (pemilu) sangat penting untuk memastikan adanya pemerintahan yang sah dan diterima oleh masyarakat.

8. Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang politik, demokrasi, dan hak kewarganegaraan untuk memperkuat partisipasi politik yang sehat dan konstruktif.

G. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Pencapaian kinerja organisasi tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kecukupan dan kualitas dukungan sumber daya yang tersedia. Empat komponen utama yang berperan penting adalah **Sumber Daya Manusia (SDM), sarana, prasarana, dan anggaran**, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Jumlah ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut pada tahun 2025 adalah sebanyak 34 orang yang terdiri dari 25 PNS, 4 PPPK penuh waktu dan 5 PPPK paruh waktu dengan latar belakang pendidikan sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

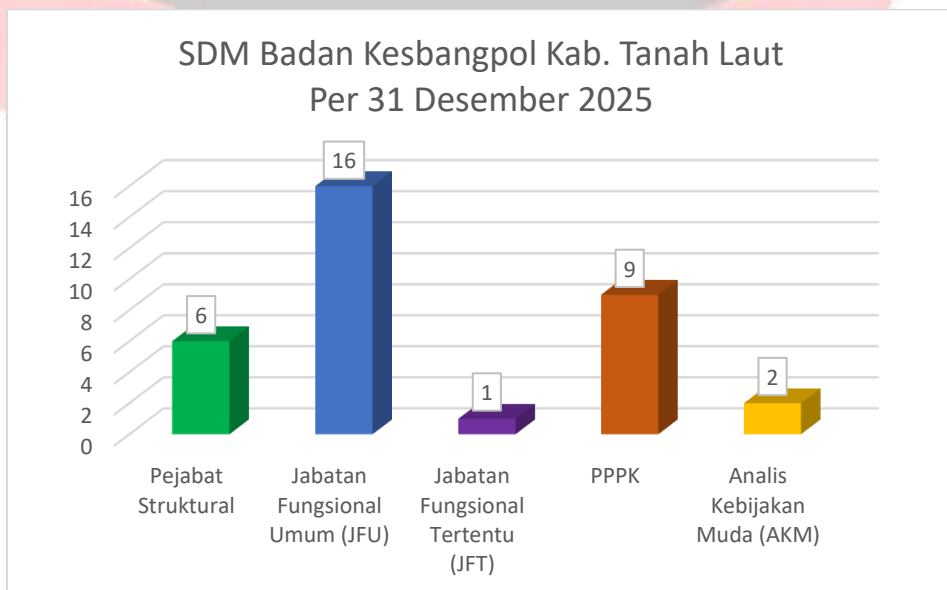
Tabel 1.1
Jumlah PNS Pergolongan / Pendidikan Tahun 2025

PNS Golongan				PPPK	Total	Pendidikan							Total
IV	III	II	I			S2	S1	D-III	D-II	SLTA	SLTP	SD	
7	13	5	-	9	34	3	20	3	-	7	1	-	34

Jumlah kebutuhan pegawai ASN Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peta jabatan adalah 74 (tujuh puluh empat) orang. Saat ini, jumlah pegawai yang menduduki posisi tersebut telah mencapai 34 (Tiga Puluh Empat) orang. Terpenuhinya formasi pada tahun 2025 antara lain disebabkan oleh pengangkatan PPPK penuh waktu dan paruh waktu untuk mendukung tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan pelayanan prima serta mencapai target yang telah ditetapkan dan disepakati bersama pimpinan.

Grafik 1.1

SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut



Berdasarkan pada grafik diatas terlihat bahwa terdapat 6 Pejabat struktural, 1 orang jabatan fungsional tertentu (JFT), 16 orang

fungsional umum (JFU), 2 Orang analis kebijakan muda dan 9 orang PPPK dengan jumlah keseluruhan 34 pegawai.

Selain didukung oleh sumberdaya manusia, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut juga didukung dengan sarana prasarana 543 unit peralatan , 1 unit gedung kantor, 1 Unit Gedung Aula, 1 unit gazebo, pagar, dan 1 unit parkir. Sedangkan sarana transportasi terdiri 7 unit kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua 13 unit.

Program, dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025

No	Program, Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Penanggung Jawab
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.292.375.047,84	13.227.928.201,86	Kepala Bakesbangpol
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.641.458.604,16	5.912.845.316,74	Sekretaris
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.999.669,00	9.999.669,00	Kasubbag Program dan Anggaran
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.682.084.824,00	4.782.084.824,00	Kasubbag Keuangan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	19.980.000,00		Kasubbag Umpeg
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	435.740.808,16	550.153.295,32	Kasubbag Umpeg
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.598.815,00	41.180.166,50	Kasubbag Umpeg
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	230.554.488,00	285.927.361,92	Kasubbag Umpeg
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	233.500.000,00	243.500.000,00	Kasubbag Umpeg

	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.917.596.268,99	2.572.153.642,80	Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.917.596.268,99	2.572.153.642,80	Kabid Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.396.019.210,65	2.379.222.783,41	Kabid Politik Dalam Negeri
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	2.396.019.210,65	2.379.222.783,41	Kabid Politik Dalam Negeri
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	618.468.073,76	689.334.224,86	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	618.468.073,76	689.334.224,86	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	401.994.011,28	456.366.610,05	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	401.994.011,28	456.366.610,05	Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.316.838.879,00	1.218.005.624,00	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.316.838.879,00	1.218.005.624,00	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Tanah Laut Nomor 7001.2.1/239 /LHE AKIP-Irbanl/Insp/2025 Tanggal 29 Agustus 2025 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD Tahun 2025 bahwa ada 4 (empat) komponen yang direkomendasikan untuk di tindaklanjuti, yaitu:

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggung jawab	Status/Progres Penyelesaian
1	Menyusun langkah perbaikan atas pemantauan kinerja sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi pada setiap triwulan guna mendukung pencapaian target kinerja dan memperhatikan tindak lanjut atas rencana aksi tindak lanjut (RATL) atas catatan - catatan perbaikan yang perlu dilakukan.	Telah dilaksanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan setiap triwulannya berdasarkan bukti undangan terlampir				Telah dilaksanakan rapat evaluasi monitoring setiap triwulan
2	Melakukan perbaikan dan Penyempurnaan Renstra Tahun 2025 - 2029 dengan Mempertimbangkan capaian tahun sebelumnya dan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan capaian output/ outcome kinerja perangkat daerah.	Disusunnya PK Perubahan 2025 yang sesuai dengan Renstra 2025 - 2029				Telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja sesuai Renstra 2025 - 2029 pada tanggal 21 Januari 2025

No	Rekomendasi	Rencana Aksi	Target	Jadwal	Penanggungjawab	Status/Progres Penyelesaian
3	Melakukan pemantauan SKP pada kinerja bawahan oleh Pimpinan dengan memberikan umpan balik (feedback) dalam bentuk narasi yang menjelaskan analisis capaian kinerja, hambatan, maupun faktor penunjangnya.	Telah dilaksanakan penilaian terhadap pegawai pada aplikasi e-kinerja yang dibuktikan dengan screenshot penilaian				Telah dilaksanakan penilaian pada aplikasi e-kinerja
4	Mempublikasi LKj. 2024 pada Website PPID	Telah Dilaksanakan publikasi pada website PPID Kab Tanah Laut ditanggal 25 September 2025				https://ppid.tanahlautkab.go.id/front/dokumen/detail/lakip-bakesbangol-2024-n87ok

I. Sistematika Penyajian

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, menggambarkan struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, aspek strategis organisasi, produk dan layanan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Memaparkan tentang Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tanah Laut yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan program/kegiatan dan sub kegiatan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi (capaian IKU dan capaian Sasaran Strategis organisasi) dan akuntabilitas keuangan (ringkasan realisasi anggaran menurut program dan kegiatan Tahun 2024

dan Tahun 2025 serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Menampilkan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, strategi di masa mendatang untuk meningkatkan kinerjanya dan penghargaan serta inovasi yang telah diraih.



A. Visi RPJMD

Visi merupakan suatu pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerja, beraktualisasi dan berinovasi agar tetap eksis, kompatibel dan produktif. Jadi, Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang merupakan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik .

Pengertian Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana Visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan Visi dan Misi tersebut kemudian dirumuskan Tujuan serta Sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta Indikator-indikatornya. Visi pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

**“Bersama Membangun Tanah Laut Simpun,
Maju, dan Berkelanjutan)”**

Visi tersebut mencerminkan komitmen kuat segenap unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut sebagai pendukung utama (*supporting force*) penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik. Badan Kesbangpol bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan kehidupan politik dan demokrasi yang sehat, pemeliharaan ketahanan sosial, serta penanganan konflik sosial di daerah. Peran tersebut diwujudkan melalui perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, dan koordinasi lintas sektor dalam pemetaan dan penanganan potensi konflik, pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, penguatan forum-forum kebangsaan, serta dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang aman dan kondusif. Dengan demikian, Badan Kesbangpol tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana program, tetapi juga sebagai pusat informasi, saran, dan bahan pertimbangan bagi Bupati dalam pengambilan kebijakan strategis yang menyangkut persatuan, stabilitas politik, dan ketenteraman masyarakat Kabupaten Tanah Laut

Komitmen untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh segenap aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut. Sebagai bentuk kesungguhan dalam mewujudkan Visi yang telah dirumuskan.

B. Misi RPJMD

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. misi tersebut adalah :

1. Membangun SDM yang Unggul dan Berdaya Saing Dengan Nilai-nilai Agama Membangun ekonomi yang inklusi

2. Membangun Ekonomi Inklusif Untuk Penurunan Kemiskinan Dengan Infrastruktur Yang Merata Dan Lingkungan Hidup Berkualitas
3. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Dinamis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Visi, Misi Bupati/Wakil Bupati sekaligus menjadi Visi, Misi bagi SKPD.

C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 maka disusunlah RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut merumuskan sebuah konsep Rencana RPJMD 2025-2029 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045
2. Agenda Pembangunan RPJMN 2025-2029
3. Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.
4. Misi RPJPD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2045
5. Isu-isu strategis Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut, teridentifikasi tiga aspek yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode 2025-2029. Ketiga aspek tersebut yaitu: Pembangunan manusia, pembangunan ekonomi dan infrastruktur yang berwawasan lingkungan, dan pembangunan Tata Kelola Pemerintahan.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan tujuan dan sasaran yang dituangkan pada Dokumen Rencana Strategis Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029. Adapun tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Harmonis dan Bertoleransi yang Berlandaskan Pancasila dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Terjaganya stabilitas kehidupan masyarakat.



Tabel 2.1

Matrik Hubungan Antara Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Realisasi Tahun 2024	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Harmonis dan Bertoleransi yang Berlandaskan Pancasila	Indeks Harmoni Indonesia (IHal)	-	6,71	6,72	6,75	6,77	6,80	6,80
1.	Terjaganya stabilitas kehidupan masyarakat	Persentase gangguan stabilitas kehidupan masyarakat yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 19 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN RUMUS
1.	Terjaganya stabilitas kehidupan masyarakat	Persentase gangguan stabilitas kehidupan masyarakat yang terselesaikan	Capaian kinerja dihitung dengan membandingkan nilai realisasi terhadap target yang telah ditetapkan, kemudian dikalikan seratus persen. Realisasi adalah hasil aktual yang dicapai pada akhir periode, sedangkan target adalah rencana kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan. Semakin besar nilai persentase hasil perhitungan (mendekati atau melebihi 100 persen), semakin tinggi tingkat pencapaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diemban oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut.

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan dinamis	Peningkatan Penerapan Good Governance dengan penerapan reformasi birokrasi dan zona integritas	Pemenuhan kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang mendukung peningkatan nilai AKIP	

		Menciptakan kualitas perencanaan, pelaporan, pemenuhan saran dan prasarana kantor	
		Menciptakan stabilitas kehidupan bermasyarakat	
		Melakukan komunikasi dan koordinasi dalam rangka menjalin hubungan kerja antarinstansi Pemerintahan guna bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi dan kesepahaman terhadap situasi dan kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui Forkopimda	
		Menciptakan stabilitas kehidupan bermasyarakat,	
		Menumbuhkembangkan kehidupan politik dan kemasyarakatan yang demokratis di Kabupaten Tanah Laut	
		Melaksanakan kegiatan pembinaan, penyuluhan, pelaksanaan upacara wawasan kebangsaan, memperkuat Forum Pembauran Kebangsaan, kegiatan lomba-lomba bertemakan wawasan kebangsaan dan penguatan karakter, serta fasilitasi Paskibraka	
		Melaksanakan Sosialisasi tentang Penyelenggaraan Toleransi dalam Kehidupan Bermasyarakat	



E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 (hanya eselon II)

No.	Kinerja Utama (Sasaran Renstra)		Indikator Kinerja Utama	Target	Penanggung Jawab
1	Terjaganya stabilitas kehidupan masyarakat	1	Persentase gangguan stabilitas kehidupan masyarakat yang terselesaikan	100%	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Untuk mewujudkan kinerja yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja yang terdiri dari 1 sasaran di atas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik didukung dengan dengan APBD sebesar Rp.13,227,928,201.86. Rincian program dan anggaran untuk mendukung masing masing sasaran terdapat pada table berikut:

Tabel 2.6
 Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Terjaganya stabilitas kehidupan masyarakat (tanpa program penunjang)	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2,572,153,643
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2,379,222,783
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	689,334,225
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	456,366,610
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1,218,005,624
JUMLAH			7,315,082,885.12

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2025 ini merupakan laporan kinerja tahun pertama Renstra 2025-2029 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Sesuai dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025-2029 terdapat 1 sasaran dengan 1 indikator, dengan hasil pengukuran rata-rata capaian IKU telah memenuhi kriteria **Sangat Tinggi** atau dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama bahwa IKU disusun dan ditetapkan sendiri oleh setiap organisasi dalam rangka mengukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 25 Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Indikator Sasaran Strategis

Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Harmonis dan Bertoleransi yang Berlandaskan Pancasila							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
1	2	3		4	5	6	7
1	Terjaganya stabilitas kehidupan masyarakat	1	Persentase gangguan stabilitas kehidupan masyarakat yang terselesaikan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2025						100%	Sangat Tinggi

2. ANALISA CAPAIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Capaian kinerja disajikan sesuai dengan keselarasan antara Renstra dengan penjabaran dalam perencanaan tahunan berupa dokumen rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Keselarasan mencakup visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan target kinerja dalam tahun 2025. Sesuai dengan dokumen Renstra 2025-2029, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah menetapkan 1 (Satu) tujuan. Masing-masing tujuan tersebut lebih konkrit dijabarkan lagi menjadi 1 sasaran, dan untuk mengukur pencapaian sasaran digunakan indikator kinerja sebanyak 1 buah.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi lima kategori sebagai berikut :

Tabel 3.4
Pengelompokan Capaian Kinerja

URUTAN	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V	kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

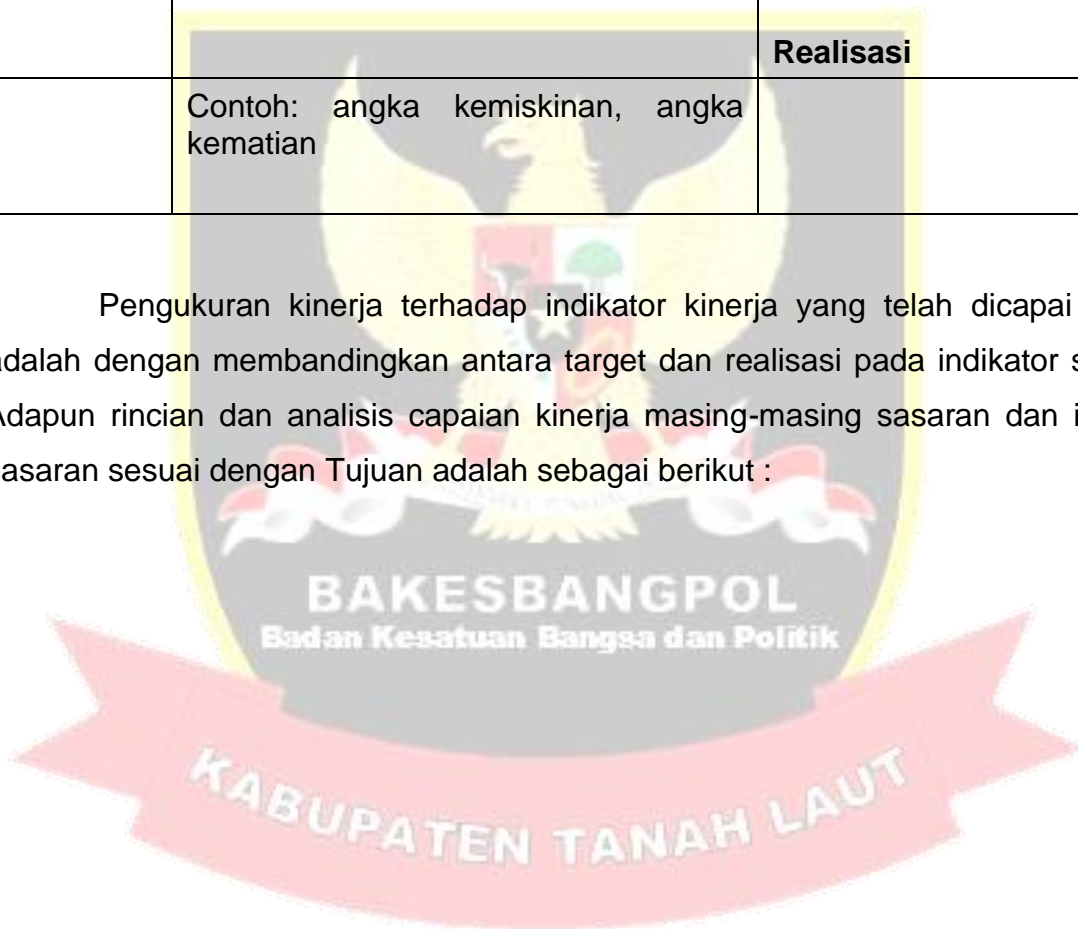
Ada dua jenis rumus pengukuran capaian kinerja yang dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Rumus Pengukuran Capaian Kinerja

KONDISI	URAIAN	RUMUS
Asumsi I (kondisi umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah</i>	Realisasi ----- X 100%
	Contoh: jumlah produksi padi, angka partisipasi murni.	Target

Asumsi II (kondisi tidak umum)	<i>Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah,</i>	Target ----- X 100% Realisasi
	<i>Atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik,</i>	Target ----- X 100% Realisasi
	Contoh: angka kemiskinan, angka kematian	

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran sesuai dengan Tujuan adalah sebagai berikut :



TUJUAN 1

Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Harmonis dan Bertoleransi yang Berlandaskan Pancasila

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut menetapkan tujuan ke I yaitu **Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Harmonis dan Bertoleransi yang Berlandaskan Pancasila**

Untuk mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 1 indikator yaitu Indeks Harmoni Indonesia (IHal).

Tabel 3.1.1
Tujuan dan indikator tujuan I

No	Tujuan Pembangunan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2025
1	Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Harmonis dan Bertoleransi yang Berlandaskan Pancasila	Indeks Harmoni Indonesia (IHal)	Nilai	6,71

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan 1 sasaran yaitu:

1. Terjaganya stabilitas kehidupan masyarakat

Analisa Pencapaian Sasaran Strategis 1

Terjaganya stabilitas kehidupan masyarakat

Terjaganya stabilitas kehidupan masyarakat diukur melalui 1 indikator dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Terhadap Target 2025

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI			TAHUN 2025		
				TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terjaganya stabilitas kehidupan masyarakat	Persentase gangguan stabilitas kehidupan masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

		yang terselesaikan							
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA 2025									100%

Tabel 3.1.3
Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2025			TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN TAHUN 2025 THD TARGET AKHIR RENSTRA
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Terjaganya stabilitas kehidupan masyarakat	Persentase gangguan stabilitas kehidupan masyarakat yang terselesaikan	%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian Kinerja Terhadap Kabupaten/Kota Lain, Provinsi dan Nasional

NO	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Hulu Sungai Selatan	Banjar	Tabalong	Tanah Bumbu	Provinsi	Nasional
1	Terjaganya stabilitas kehidupan masyarakat	Persentase gangguan stabilitas kehidupan masyarakat yang terselesaikan	%	100	n/a	100	38		

a. Persentase gangguan stabilitas kehidupan masyarakat yang terselesaikan

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram, tertib, damai dan sejahtera maka diperlukan upaya penanganan konflik sosial, yaitu membuat serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Untuk memperoleh Persentase gangguan/ stabilitas kehidupan masyarakat yang terselesaikan dengan rumus sebagai berikut :

Persentase gangguan stabilitas kehidupan masyarakat yang terselesaikan =	$\frac{\text{Jml gangguan stabilitas kehidupan masyarakat yang di tangani}}{\text{Total Gangguan Stabilitas Kejadian yang terjadi}} \times 100\%$
--	---

Tabel : 3.6

Daftar Gangguan Stabilitas Kehidupan Masyarakat Tahun 2025

No	Gangguan Stabilitas Kehidupan Masyarakat	Tempat Kejadian Gangguan Stabilitas Kehidupan Masyarakat
1	Sengketa Lahan Perkebunan Antarwarga	Desa Damit-Damit Hulu Kecamatan Batu Ampar
2	Polemik Pendirian/Penggunaan Rumah Ibadah Sementara Umat Kristen	Desa Simpang Empat Sungai Baru Kec. Jorong

Pada Tahun Anggaran 2025, persentase gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat yang terselesaikan mencapai 100% dari target 95%, atau setara 133% capaian IKU, melalui penanganan dini 2 potensi konflik utama (Desa Simpang Empat Sungai Baru dan Desa Damit-Damit Hulu) via mediasi FKUB dan koordinasi Forkopimda. Peningkatan ini didukung oleh pemantauan rutin 96 desa/kelurahan bebas konflik (98% dari 100 desa target), dialog kerukunan umat beragama, serta sinergi dengan TNI-Polri, berkontribusi pada indeks kerukunan daerah yang stabil. Realisasi melampaui capaian tahun sebelumnya (90% pada 2024 dari 2 kasus), menunjukkan efektivitas program kewaspadaan nasional Bidang Penanganan Konflik

Potensi konflik yang terjadi selama tahun 2025 yaitu sengketa lahan perkebunan antarwarga dan Konflik intern umat beragama yaitu Polemik Pendirian/Penggunaan Rumah Ibadah Sementara Umat Kristen. Sedangkan jumlah potensi konflik intern dan antarumat beragama Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 terjadi 3 konflik inter umat beragama dan berhasil dimediasi.



Grafik 3.1.2

Jumlah gangguan stabilitas kehidupan masyarakat yang terselesaikan Tahun 2021 – 2025

Sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 9 Tahun 2006, Nomor : 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Bahwa Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintahan daerah dan Pemerintah. Forum Kerukunan Umat Beragama, yang selanjutnya disingkat FKUB, adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut sebagai mitra dan mempunyai peran signifikan yakni bersama - sama bersinergi dengan pemerintah dan tokoh masyarakat untuk senantiasa menjaga kerukunan umat beragama baik intern maupun antar umat beragama sehingga diperlukan sikap keterbukaan dari berbagai pihak dan kemampuan untuk memahami dan mencermati serta menganalisa sumber-sumber konflik ataupun potensi-potensi yang bisa mengarah tersulutnya konflik.

Gambar 3.1



Pengurus FKUB

Kabupaten Tanah Laut adalah salah satu daerah yang penduduknya terdiri dari berbagai suku, ras dan agama, hampir semua Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut dihuni beraneka suku, ras dan agama tersebut menjadikan Kabupaten Tanah Laut sebagai Kabupaten yang multikultural dan multiagama. Dengan beranekaragam ragam suku, ras dan agama akan sangat mudah terjadinya konflik apabila keragaman tidak dijaga dan dipelihara, oleh karena itu kehidupan harmonis dan rukun harus senantiasa dikokohkan di dalamnya, agar konflik tidak terjadi. Namun dalam perkembangan masih ada terjadi gesekan di kalangan antar suku, antar golongan dan antar agama. Pada Tahun 2025 ada konflik inter dan antar umat beragama, yaitu :

1. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut menggelar mediasi terkait pendirian rumah ibadah yang berlokasi di Desa Simpang Empat Sungai Baru, Kecamatan Jorong. Pertemuan berlangsung di kantor sekretariat FKUB Tanah Laut dan dihadiri sejumlah pihak terkait. Turut hadir dalam mediasi tersebut, Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni Budaya, Agama,

dan Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Tanah Laut, Kasubbag Kemenag Tanah Laut, Kepala Desa Simpang Empat Sungai Baru, tokoh Kristen dari Gereja Bethel Indonesia (GBI) dan Gereja Jemaat Kristen Indonesia (JKI), serta perwakilan masyarakat setempat. Ketua FKUB Tanah Laut menyampaikan bahwa pertemuan ini difokuskan untuk menyelesaikan persoalan rumah doa dan hubungan antara jemaat GBI dan JKI dengan warga RT 15 Desa Simpang Empat Sungai Baru. "Alhamdulillah, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan baik. Kedua belah pihak sudah memahami kondisi di lapangan dan sepakat membangun komunikasi yang lebih intens dengan masyarakat sekitar serta pemerintah desa, Dalam hasil kesepakatan, GBI dan JKI akan mematuhi arahan Kepala Desa terkait kegiatan keagamaan. Untuk sementara, kegiatan ibadah akan dilaksanakan dalam lingkup internal jemaat, sambil terus mempererat hubungan dengan warga sekitar. FKUB berharap kesepakatan ini dapat menjaga kerukunan umat beragama di Tanah Laut, sekaligus menjadi contoh penyelesaian masalah secara musyawarah dan damai



Gambar 3.2 Rapat tindak lanjut mediasi terkait pendirian rumah ibadah yang berlokasi di Kantor Desa Simpang Empat Sungai Baru

Sedangkan Konflik sosial menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan.

1. Tanggal 02 Juni 2025 bertempat di Aula Kecamatan Batu Ampar, Mediasi Terkait Lahan Perkebunan Masyarakat Desa Damit dan Damit Hulu.

Dilaksanakan mediasi antar pemilik lahan an.Ibu Erna Anggraini yang berada diwilayah desa Damit dan Damit Hulu, dalam mediasi tersebut Kepala Desa Damit menyampaikan ada 34 lahan (100 ha) yang menjadi sengketa oleh ibu Erna Angraini, dan Kepala Desa Damit Hulu menyampaikan bahwa lahannya jauh dari permukiman, Berdasarkan informasi dari pihak ibu Erna Angraini pihaknya memiliki lahan seluas 340 ha, yang diperoleh sejak tahun 2007 sudah menguasai lahan tersebut sesuai dengan surat tanah dari Kepala Desa Asam-Asam. Mediasi ini atas permintaan dari pihak Ibu Erna Angraini karena saat ini ada kegiatan penggarapan dilokasi lahan tersebut, masyarakat merasa dirugikan karena sudah banyak yang menanami lahan tersebut dengan pohon sawit sehingga sebagian warga yang merasa menanami sawit dilahan tersebut merasa dirugikan. Ada beberapa penawaran yang diberikan oleh pihak ibu Erna Anggraini atas permasalahan ini yaitu Ibu Erna Angraini menawarkan tukar guling dengan lahan miliknya yang berdekatan dengan lahan yang digarap warga, tetapi warga belum menerima tawaran tersebut sehingga tidak ada proses yang dapat dilanjutkan/ Deadlock. Tidak ditemukan kesepakatan atas masalah ini Mungkin selanjutnya akan menggunakan langkah hukum.



Gambar 3.3 Mediasi Sengketa Lahan Perkebunan Antarwarga Desa Damit-Damit Hulu di Kantor Kecamatan Batu Ampar

1) Perbandingan antar realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja indikator "persentase gangguan stabilitas kehidupan masyarakat yang terselesaikan" pada Bakesbangpol Tanah Laut menunjukkan tren stabilisasi setelah puncak konflik, dengan capaian 2025 mencapai 100% dari 2 kasus, lebih baik dari 2023 (asumsi 80% dari 5 kasus). Dibandingkan tahun lalu (2024: 100% dari 2 kasus), realisasi tetap tinggi berkat mediasi FKUB dan Forkopimda, sementara tren 2020-2022 (0-2 kasus, 100%) menandakan pencegahan efektif.

2) Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Organisasi.

Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini untuk indikator persentase gangguan stabilitas kehidupan masyarakat yang terselesaikan sudah berada di atas atau mendekati target jangka menengah Renstra, sehingga secara garis besar sasaran strategis "Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat" tercapainya realisasi dari target yang telah direncanakan.

Jika di Tanah Laut tren 2020–2025 menunjukkan 0–2 kasus per tahun dengan persentase penyelesaian 100% pada 2022, 2024, dan 2025, maka realisasi tersebut sudah sejalan bahkan melampaui target menengah yang biasanya mensyaratkan konflik dapat dikendalikan pada level minimal dengan penyelesaian $\geq 95\%$.

Realisasi persentase gangguan yang terselesaikan sampai dengan tahun 2025 konsisten berada pada kategori “sangat tinggi” ($\geq 100\%$ terhadap target tahunan), sehingga mendukung pencapaian sasaran Renstra 2025–2029 untuk menjaga stabilitas dan menurunkan konflik sosial di daerah.

Dibandingkan target jangka menengah yang menekankan tren penurunan jumlah konflik dan peningkatan penanganan 100%, capaian aktual menunjukkan bahwa Bakesbangpol telah *on track bahkan more advanced*, karena eskalasi 2023 (5 kasus) mampu ditekan menjadi 2 kasus dan seluruhnya diselesaikan, sesuai arah kebijakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial dalam dokumen strategis organisasi.

3) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Kabupaten/Kota lain, Provinsi dan Nasional

Realisasi kinerja tahun ini (penyelesaian 100% dari 2 kasus gangguan stabilitas di Kabupaten Tanah Laut) pada prinsipnya sudah selevel bahkan sedikit lebih baik dibanding beberapa Kabupaten di Kalimantan Selatan dan sejalan dengan pola provinsi/nasional, meskipun data rinci Kalsel per kabupaten tidak seluruhnya dipublikasikan terbuka.

Posisi terhadap Kabupaten/Kota di Kalsel

Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tabalong: laporan kinerja 2025 mencatat potensi konflik (politik dan sosial budaya) dengan penyelesaian 100%, sehingga capaian indikator penanganan konflik sosial 100%.

Beberapa kabupaten/kota lain di Kalsel (Banjar, Tanah Bumbu, dsb.) umumnya menetapkan target penyelesaian konflik 100%, tetapi data persentase realisasi per kasus tidak dicantumkan rinci di sumber terbuka; pola yang tampak adalah jumlah kasus lebih banyak saat menjelang pemilu/pilkada, namun kinerja dianggap baik bila semua konflik tertangani. Beberapa Kabupaten juga diketahui menggunakan indikator yang berbeda. Dengan 2 kasus dan penyelesaian 100%, kinerja Kabupaten Tanah Laut berada dalam kategori “sama baiknya” dengan Hulu

Sungai Selatan dan Tabalong (sama-sama 100%), hanya berbeda pada jumlah kasus yang ditangani.

Posisi terhadap Provinsi Kalsel dan Nasional

Provinsi Kalimantan Selatan: Bakesbangpol Provinsi menekankan deteksi dini dan cegah dini jelang Pilkada, dengan orientasi penanganan sistematis seluruh konflik sosial; target operasional yang digunakan juga 100% penanganan konflik, sebagaimana tersirat dalam kegiatan penyusunan RAD Tim Terpadu Konflik Sosial dan pengukuran Indeks Kewaspadaan Nasional.

Tingkat Nasional: kebijakan penanganan konflik sosial (UU No. 7/2012 dan turunannya) serta indikator Kewaspadaan Nasional Kemendagri pada prinsipnya juga menggunakan target 100% penanganan konflik yang terjadi melalui pencegahan, penghentian dan pemulihan.

Realisasi 100% penyelesaian kasus di Tanah Laut berarti sudah memenuhi standar Provinsi Kalsel dan Nasional, tidak berada di bawah benchmark, dan dapat dinarasikan sebagai kinerja yang sepadan dengan capaian provinsi dan beberapa kabupaten lain di Kalsel

“Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Kalimantan Selatan, kinerja Bakesbangpol Kabupaten Tanah Laut dalam penyelesaian gangguan/stabilitas kehidupan masyarakat tahun ini berada pada kategori sangat tinggi, dengan seluruh kasus yang terjadi (2 kasus) berhasil diselesaikan atau capaian 100%. Capaian ini sejalan dengan kinerja Bakesbangpol Kabupaten Balangan yang juga menyelesaikan seluruh 5 potensi konflik pada tahun 2024, serta konsisten dengan orientasi kebijakan Provinsi Kalimantan Selatan dan standar nasional yang menargetkan penanganan 100% terhadap konflik sosial di daerah.

4) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dalam mencapai sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik “Terjaganya stabilitas kehidupan masyarakat”, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan Peningkatan penanganan potensi gangguan sosial budaya agama dan ekonomi, Peningkatan pendidikan politik, Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan terhadap pembangunan daerah, Peningkatan

pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial agama dan budaya serta Peningkatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan.

1. Peningkatan penanganan potensi gangguan sosial budaya agama dan ekonomi

1. Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) yang beranggotakan berbagai tokoh yang ada di Kecamatan dan Kabupaten. Selain itu juga dilaksanakan rapat FKDM yang juga melibatkan seluruh anggota FKDM seluruh Kecamatan dalam rangka pembinaan tentang pelaporan Ancaman, Tantangan, Hmbatan dan Gangguan.
2. Pembentukan Tim PORA (Pengawasan Orang Asing), anggotanya terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kejaksaan, Polres, Kodim, BIN, dan Badan intelegen Strategis yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
3. Optimalisasi pencegahan konflik sosialisasi, penyuluhan, pembinaan, dengan materi, wawasan kebangsaan, ideology, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan serta P4GN, kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar/mahasiswa, pemangku kepentingan, yang ada di Kabupaten Tanah Laut.
4. Meningkatkan Peran FKUB

Meningkatkan peran serta tokoh-tokoh agama untuk menjaga kerukunan dan harmonisasi masyarakat Tanah Laut, untuk itu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memfasilitasi dengan menyelenggarakan mediasi konflik inter umat beragama dan rapat koordinasi para pemuka agama yang tergabung dalam Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tanah Laut serta memberikan bantuan hibah kepada pengurus FKUB Kabupaten Tanah Laut.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bekerja sama dengan FKUB Tanah Laut dan Kementerian Agama (Kemenag) Tanah Laut dalam menyelenggarakan sosialisasi Kerukunan Umat Beragama yang dilaksanakan di Aula Bela Negara Kesbangpol Tanah Laut.. Sosialisasi

Kerukunan Umat Beragama diharapkan dapat mempererat kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Tanah Laut.

Gambar 3.15 Kerukunan Umat Beragama



5. Meningkatkan koordinasi antar pimpinan instansi Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal yang ada di Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mengkoordinasikan isu-isu terkini dan memastikan cara penanganan dan penanggulangannya. Rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Tanah Laut diikuti oleh Bupati, Pimpinan DPRD, Komandan Kodim 9001/Tanah Laut, Kepala Polisi Resort Tanah Laut, Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut, Kepala Pengadilan Negeri Tanah Laut, Kepala Pengadilan Agama Tanah Laut serta para pimpinan perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Forkopimda yang dilaksanakan selama Tahun 2025 sebanyak 4 kali kegiatan.

Tabel 3.11 Kegiatan Forkopimda selama Tahun 2025

No.	Kegiatan	Tempat	Pembahasan / Materi	Dokumen
1.	Rapat Tim Sekretariat Forkopimda 29 Juli 2025	Alana Hotel Yogyakarta	Rapat persiapan untuk pelaksanaan Rapat Forkopimda	
2.	Rapat koordinasi 30 Juli 2025	Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta	Upaya memperkuat sinergitas antar unsur pimpinan daerah	 
3.	Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Tanah Laut 12 Desember 2025.	Hotel Ashley Tanah Abang Jakarta	<p>sinergitas Forkopimda dalam membangun Kabupaten Tanah Laut</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan Natal dan Tahun Baru (Kasatpol dan PIt. Dishub) 2. Permasalahan Solar Nelayan (Kepala DKPP) 	

No.	Kegiatan	Tempat	Pembahasan / Materi	Dokumen
			<p>3. Pelaksanaan Pembangunan Fisik (kepala DPUPRP)</p> <p>4 Laporan Kegiatan (Plt. kepala DPRKPLH)</p>	
4.	Rapat Tim Sekretariat Forkopimda 13 Desember 2025.	Ashley Hotel Wahid Hasyim Jakarta	Rapat menindaklanjuti hasil rapat Forkopimda tanggal 12 Desember 2025	
5.	Rapat Koordinasi 24 Desember 2025	Aula Rakat Manuntung Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	rapat koordinasi dan monitoring malam natal tahun 2025	

No.	Kegiatan	Tempat	Pembahasan / Materi	Dokumen
6.	Rapat Koordinasi 26 Desember 2025	Aula Rakat Manuntung Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut	Rapat Persiapan jelang perayaan menyambut Tahun Baru 2026	

6. Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Rapat Timdu Penanganan Konflik Sosial bertujuan untuk berkoordinasi antar lembaga, baik penegak hukum maupun masyarakat, mengidentifikasi konflik dan langkah-langkah penanganan konflik serta pencegahan konflik.

Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dihadiri oleh pihak-pihak terkait antara lain aparat penegak hukum, instansi lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, serta masyarakat.



Gambar 3.20 Rapat Timdu Penanganan Konflik Sosial

7. Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah

Rapat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah suatu pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk membahas dan menganalisis potensi ancaman atau peristiwa yang dapat memicu gangguan atau konflik sosial di masyarakat. Rapat ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini terhadap situasi yang

berisiko, serta merumuskan langkah-langkah pencegahan atau penanganan yang tepat agar masalah tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar.



Gambar 3.21 Rapat Tim KDPD

2. Peningkatan pendidikan politik

1. Sosialisasi Sekolah Demokrasi SLTA/Sederajat di 5 Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut

Sebagai bagian dari upaya penguatan pendidikan demokrasi dan kesadaran politik di kalangan generasi muda sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2021 tentang Sekolah Demokrasi, Bidang Pendidikan Politik dan Pemerintahan (Poldagri) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut melaksanakan sosialisasi Sekolah Demokrasi tingkat SLTA/Sederajat pada Tahun 2025

Kegiatan ini dilaksanakan secara bertahap di 5 (lima) sekolah negeri di 5 (lima) kecamatan prioritas, yaitu:

1. SMA Negeri 1 Bumi Makmur, Kecamatan Bumi Makmur (tanggal 15 Mei 2025);
2. SMAN 1 Panyipatan, Kecamatan Panyipatan (tanggal 22 Mei 2025),
2. SMAN Kintap, Kecamatan Kintap (tanggal 8 Mei 2025)
3. SMAN Bati-Bati, Kecamatan Bati-Bati (tanggal 5 Mei Batu Ampar),
4. SMK Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar (tanggal 18 Januari

2026).

Pelaksanaan Kegiatan;

Sosialisasi dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Poldagri disertai 2 (dua) narasumber ahli demokrasi dan 4 (empat) pendamping teknis. Setiap sesi berlangsung selama 2-3 jam dengan agenda utama:

Penyampaian materi Sekolah Demokrasi (mekanisme pendaftaran, manfaat sertifikasi, dan peran pemuda dalam demokrasi).

Diskusi interaktif dan simulasi pemilu siswa.

Pendaftaran peserta calon siswa Sekolah Demokrasi secara online melalui platform resmi KPU.

Peserta terdiri dari siswa kelas XI-XII dan guru BP selaku pendamping, dengan total kehadiran 350 orang (rata-rata 70 orang per sekolah). Fasilitas pendukung meliputi LCD proyektor, leaflet sosialisasi, dan formulir pendaftaran. Tidak ada hambatan signifikan, meskipun di Kecamatan Bati-Bati sempat terjadi hujan deras yang disiasati dengan relokasi ke aula indoor.

Capaian dan Dampak

Kegiatan berhasil mendaftarkan 280 siswa sebagai calon peserta Sekolah Demokrasi (target 250 orang, realisasi 112%), meningkatkan pemahaman demokrasi di kalangan pelajar hingga 90% berdasarkan kuesioner pasca-sosialisasi. Kegiatan ini berkontribusi pada indikator kinerja Bidang Poldagri, khususnya peningkatan kesadaran politik masyarakat (target 80%, realisasi 85%). Dokumentasi lengkap (foto, notulen, dan daftar hadir) tersedia dalam lampiran.

Kegiatan ini menunjukkan komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dalam membangun generasi demokratis yang berkualitas.



2. Sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) di 11 Desa

Sebagai wujud komitmen penguatan literasi pemilu di tingkat desa sesuai Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Desa Peduli Pemilu dan amanat RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2025-2029, Bidang Pendidikan Politik dan Pemerintahan (Poldagri) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut melaksanakan sosialisasi Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan pada Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan menjangkau 130 kantor desa di seluruh 11 kecamatan, yaitu Kecamatan Bajuin (9 desa), Bati-Bati (14 desa), Batu Ampar (14 desa), Bumi Makmur (11 desa), Jorong (11 desa), Kintap (14 desa), Kurau (11 desa), Panyipatan (10 desa), Pelahari (15 desa), Takisung (12 desa), dan Tambang Ulang (9 desa). Sosialisasi dilaksanakan bertahap melalui kunjungan tim ke kantor desa di Tahun 2025, dengan koordinasi Camat dan Kepala Desa.

Pelaksanaan Kegiatan

Dipimpin Kepala Bidang Poldagri bersama 5 narasumber ahli pemilu dan 10 pendamping teknis, setiap sesi di kantor desa berlangsung 90 menit dengan agenda:

Penyampaian kriteria Desa Peduli Pemilu (penggunaan TPS ramah disabilitas, sosialisasi netralitas, dan relawan pemilu desa).

Simulasi modul pengelolaan daftar pemilih dan pengawasan pemilihan.

Penandatanganan komitmen Desa Peduli Pemilu oleh Kepala Desa.

Total peserta 1.300 orang (10 orang per desa), meliputi perangkat desa,

BPD, dan tokoh masyarakat. Fasilitas mencakup banner, modul cetak, dan aplikasi SID pemilu.

Capaian dan Dampak

Berhasil 120 desa (92% dari 130 desa) menyatakan komitmen sebagai Desa Peduli Pemilu (target 100 desa, realisasi 120%), dengan peningkatan pemahaman sebesar 88% berdasarkan kuesioner. Kegiatan ini berkontribusi pada indikator LAKIP Bidang Poldagri yaitu indeks kesiapan pemilu desa (target 80%, realisasi 90%).

Kegiatan ini memperkuat basis demokrasi desa di Kabupaten Tanah Laut menjelang Pemilu 2029.

3. Rapat Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Dalam rangka penguatan literasi keuangan politik dan transparansi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik serta Kepmendagri Nomor 900.1.9.1-068/2025 tentang Pencairan Bantuan Tahun 2025, Bidang Pendidikan Politik dan Pemerintahan (Poldagri) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut melaksanakan sosialisasi bantuan keuangan kepada partai politik peserta Pemilu 2024 yang memperoleh kursi DPRD sepanjang Tahun Anggaran 2025.

Sosialisasi dilaksanakan di Aula Bela Negara Kantor Bakesbangpol Kabupaten Tanah Laut pada tanggal 2 Juli 2025 dihadiri oleh pimpinan 8 partai politik penguasa kursi DPRD Kabupaten Tanah Laut (PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN). Kegiatan menjangkau 80 kader partai dari 11 kecamatan melalui dua gelombang sosialisasi terpusat.

Pelaksanaan Kegiatan

Dipimpin Kepala Bidang Poldagri bersama narasumber dari Ditjen Polpum Kemendagri dan BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, agenda mencakup:

Penyampaian besaran bantuan Rp1.500 per suara sah DPRD Kabupaten/Kota (total pagu Rp450 juta TA 2025).

Mekanisme pencairan satu tahap pasca-audit LPJ tahun 2025 dan pengajuan proposal via e-Organisasi.

Workshop penyusunan LPJ penggunaan bantuan untuk pendidikan politik dan organisasi.

Fasilitas meliputi modul cetak, video Kepmendagri, dan aplikasi pelaporan keuangan parpol.

Capaian dan Dampak

Berhasil sosialisasi 100% penerima bantuan (8 parpol), dengan 75% LPJ tahun 2025 diserahkan tepat waktu sehingga pencairan TA 2025 terealisasi 95% (Rp427,5 juta dari pagu Rp450 juta). Tingkat pemahaman tata kelola bantuan mencapai 90% berdasarkan kuesioner, mendukung indikator LAKIP Bidang Poldagri pada indeks transparansi politik daerah (target 85%, realisasi 92%).

Kegiatan ini meningkatkan akuntabilitas penggunaan bantuan keuangan parpol di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui Bidang Politik juga telah menyalurkan hibah kepada Partai Politik dengan rincian:

Tabel 3.9 Jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2025

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH		NILAI PER SUARA SAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	JUMLAH SETORAN SISA	JUMLAH REALISASI
		KURSI	SUARA				
1	GERINDRA	7	32,957	12,000	395,484,000	274,596	395,209,404
2	PDIP	6	30,325	12,000	363,900,000	125,300	363,774,700
3	GOLKAR	5	31,961	12,000	383,532,000	-	383,532,000
4	PAN	4	24,365	12,000	292,380,000	37,240	292,342,760
5	NASDEM	4	19,442	12,000	233,304,000	-	233,304,000
6	DEMOKRAT	3	14,856	12,000	178,272,000	-	178,272,000
7	PKB	3	14,412	12,000	172,944,000	130,546	172,813,454
8	PKS	2	9,525	12,000	114,300,000	-	114,300,000

9	PPP	1	8,559	12,000	102,708,000	-	102,708,000
	JUMLAH	35	186,402	12,000	2,236,824,000	567,682	2,236,256,318

Sumber: Badan Kesbangpol Tanah Laut

3. Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan terhadap pembangunan daerah

1. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Tahun 2025 melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat yang bermitra dengan Pemerintah Daerah. Organisasi Masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut diharapkan aktif dan melaporkan keberadaannya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan memanfaatkan aplikasi berbasis web, SILapor-Ormas.

Gambar 3.13 Aplikasi SILapor-Ormas



Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menyalurkan hibah kepada Organisasi Masyarakat setelah melalui tahapan administrasi dan verifikasi. Diharapkan dengan disalurkan hibah tersebut, Organisasi Masyarakat penerima hibah lebih aktif dalam bermitra dengan Pemerintah Daerah dan dapat memberi kontribusi positif di masyarakat.

**DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) YANG MELAPOR
PADA BADAN KESBANGPOL KAB. TANAH LAUT TAHUN 2025**

N O.	NAMA ORGANISASI	BIDANG KEGIATAN	PENGURUS			NO TELP/ HP	NO. DAN TGL. SK KEPENGURUSAN	MASA BAKTI KEPENGURUSAN		ALAMAT	NO. DAN TGL. SK KEMENKUMHAM/SKT	NOMOR BERKAS	KET
			KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA			THN	THN				
1	DPD Kita Indonesia Prabu (KIPRA) Kabupaten Tanah Laut	Sosial Ekonomi	Drs. Muhammad Zahir Firdaus	Tata Selamat Sentosa	Misni Arwati	08214 17791 76	Nomor:08/SK-DPW/XII/2024	2024	2029	JL.A Yani Desa Panggung Rt 004 Rw.001 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Nomor : AHU-0004444.AHA.01.07.Tahun 2024	200.1.4/01-HAN/Bakesbang pol 5 Februari 2025	Aktif
2	DPC Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tanah Laut	Sosial Kemasyarakatan	Samsiar	Slamet Prayitno	Syarwani	08125 08155 97	Nomor: 09/Skep/DPD-APDESI/IV/2024	2024	2029	Jl.Pangeraan Antasari Kel.Pelaihari Kec.Pelaihari Kab.Tanah laut	Nomor SKT : 1000-00-00/052/III/2022	200.1.4/02-HAN/Bakesbang pol 10 Februari 2025	Aktif
3	Pengurus Daerah Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kab Tanah Laut	Agama	Muhammad Syarkani	Siti Ramlah	Risnawati	08125 02422 42	Nomor 121 Tahun 2023	2023	2027	Jl.H.Boejasin RT.026 RW. 007 Kel. Angsau Kec.Pelaihari	Nomor: AHU-0000118.AH.01.07 Tahun 2024	200.1.4/03-HAN/Bakesbang pol 11 Februari 2025	Aktif
4	Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Ath-Thohiriyah Batakan	Pendidikan	Samsudin	Muhammad Rizali	Akhmad Jali	08214 82742 19	Nomor: 20/YPI/DB/2021	2021	2026	Jl.H.Hasan Basri Rt.01/III/Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut	Nomor: AHU-0019139.AH.01.04.Tahun 2016	200.1.4/04-HAN/Bakesbang pol 05 Mater 2025	Aktif
5	Pengurus Cabang Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih Kabupaten Tanah Laut (PC.PEPELINGASIH)	Sosial Kemasyarakatan Lingkungan	Suratno	Anita Pratiwi	Sarmila Azlina	08225 13094 77	Nomor : 013/DPDKALSEL/SK/PC/I/2025	2025	2027	Rombongan 4 RT 007/004 Desa Sumber Makmur Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut	Nomor: AHU-0012178.AH.01.07.Tahun 2022	200.1.4/05-HAN/Bakesbang pol 13 Maret 2025	Aktif

N O.	NAMA ORGANISASI	BIDANG KEGIATAN	PENGURUS			NO TELP/ HP	NO. DAN TGL. SK KEPENGURUSAN	MASA BAKTI KEPENGURUSAN		ALAMAT	NO. DAN TGL. SK KEMENKUMHAM/SKT	NOMOR BERKAS	KET
			KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA			THN	THN				
6	Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PII) Kabupaten Tanah laut	Pendidikan	Muhammad Taher	Muhammad Razi	Rahman Abdul Jabar	08225 30409 74	Nomor: BB/SEK/KPTS/00 2/II/1446-2025	202 4	2026	Jl. Kelapa Indah RT.018 RW.002 Desa Batakan Kec. Panyipatan	Nomor: AHU-0001001.AH.01.08.Tahun 2021	200.1.4/06-HAN/Bakesbang pol 13 Maret 2025	Aktif
7	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	Olahraga	MUHAMMAD FAHRIANNOOR .S.Pd.I	ARIES TRISNANTRI, ST	RACHMA DANI	08135 10999 85	c-28-ht.01.03.th.2006	202 2	2026	Jalan Hutan Kota Kelurahan Pelaihari Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Nomor : C-28.HT.01.03.Tahun 2006	200.1.4/07-HAN/Bakesbang pol 13 Maret 2025	Aktif
8	DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Tanah Laut	Kepemudaan	Kusnul Mutakim	Ramadani	Muhammad Saipulah	08575 07626 58	Nomor: KEP-023/K/AMPI-KALSEL/XI/2024	202 4	2029	Komplek SDN Atu-atu Blok F No.42 Desa Atu-Atu Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Nomor: AHU-0001414.AH.01.08.Tahun 2022	200.1.4/08-HAN/Bakesbang pol 14 Maret 2025	Aktif
9	Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) Kabupaten Tanah Laut	Sosial Ekonomi	Evan Zachari Asher	Imam Choiri Sutrisno	Rahmat Hidayat	08211 31100 02	Nomor: 04/SK-DPW/FKP-KALSEL/III/2022	202 2	2025	Jl. Sepakat No.55 RT.015 RW.004 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Nomor:AHU-0000488.AH.01.08.Tahun 2019	200.1.4/09-HAN/Bakesbang pol 14 Maret 2025	Aktif
10	Dewan Pengurus Daerah Kalaborasi Pemuda Indonesia Maju Kabupaten Tanah Laut (KOPITALA)	Sosial dan Pendidikan	Syahrul Fuad	Reny Iswandini	Eka Aprilya Anggraini	08539 68441 12	Nomor:SK-07/KOPIKALSEL/I/2025	202 5	2026	Jl. Gembira RT.001 RW.001 Kel.Pelaihari Kec.Pelaihari	Nomor:AHU-0006169.AH.01.07.Tahun 2020	200.1.4/10-HAN/Bakesbang pol 14 Maret 2025	Aktif

N O.	NAMA ORGANISASI	BIDANG KEGIATAN	PENGURUS			NO TELP/ HP	NO. DAN TGL. SK KEPENGURUSAN	MASA BAKTI KEPENGURUSAN		ALAMAT	NO. DAN TGL. SK KEMENKUMHAM/SKT	NOMOR BERKAS	KET
			KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA			THN	THN				
11	Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Tanah Laut (Kwarcab Tanah Laut)	Kepemudaan	Dahnial Kifli	Armidahayati	Mery Ramadhana	0811555350	Nomor : 30 Tahun 2023	2020	2025	Jl.Gagas Komplek Perkantoran Rt.023 Rw.006 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut	Keputusan Presiden RI Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010	200.1.4/11-HAN/Bakesbang pol 14 Maret 2025	Aktif
12	KB-Wirawati Catur Panca Kab. Tanah Laut	Sosial Kemasyarakatan	Hj. ASLAMIA TUL FAUZIAH	SUPINI	Hj. RAUDANI AH, S.Sos	08125161880	Nomor : SKEP/25/PD/KB-WCP/VI/2024	2024	2029	JL.KH.Mansyur No.04 RT.014 RW.005 Kel.Angsau Kec. Pelaihari	Nomor:AHU-0000740.AH.01.08.Tahun 2019	200.1.4/12-HAN/Bakesbang pol 14 Maret 2025	Aktif
13	Dewan Pimpinan Daerah Tutus Banjar asli (Tabas) Kab. Tanah laut	Sosial Kemasyarakatan, Kesenian	ABDULLAH	ABDUL SAMAN	SELAMAT RAMADHAN	085820548223	No.002/SK-DPD-TABAS/Kal-SEL-24/II/2025	2025	2030	JL. Datu Insad RT 02/RW 02 Desa.Sambangan Kec. Bati-bati Kab Tanah laut	Nomor:AHU-0006971.AH.01.07.Tahun 2023	200.1.4/13-HAN/Bakesbang pol 14 Maret 2025	Aktif
14	DPC Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Kabupaten Tanah Laut	Sosial Kemasyarakatan	Heri Wiyadie, S.Pd	Abdul Sani	Noor Chasanah, S.Pd	81217481747	Nomor : 08/SK/DPD-PPDI Kalsel /IV/2025	2025	2029	Jl.Swadaya No.21 RT.18A RW.006 Kel.Angsau Kec. Pelaihari	Nomor:AHU-0000971.AM.01.08.Tahun 2023	200.1.4/14-HAN/Bakesbang pol 14 Maret 2025	Aktif
15	Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Tanah Laut (HPPMTL)	Organisasi Kepemudaan	Hariyanor	Akhmad Zulmi	Nisnina Safitri	085345631654	Nomor:0124/B/PP/HPPMTL/VI/2025	2025	2030	Jl.Hutan Kota RT.026 Rw.007 Kelurahan Angsau Kec. Pelaihari	Nomor AHU-0003593.AH.01.07.Tahun 2025	200.1.4/15-HAN/Bakesbang pol 3 juli 2025	Aktif

N O.	NAMA ORGANISASI	BIDANG KEGIATAN	PENGURUS			NO TELP/ HP	NO. DAN TGL. SK KEPENGURUSAN	MASA BAKTI KEPENGURUSAN		ALAMAT	NO. DAN TGL. SK KEMENKUMHAM/SKT	NOMOR BERKAS	KET
			KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA			THN	THN				
16	Dewan Pimpinan Daerah Tanah Laut Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (BAMAGNAS)	Keagamaan	Hanny Elia Yoel momongan	Andarias Lembang	Dazica Lemon Patra	08134 93266 11	Nomor:089/SK-DPD/BAMAGNAS/II/2025	2025	2028	Jl.Kemakmuran RT.020 RW.007 Kel.Angsau Kec. Pelaihari	Nomor AHU-191.AH.01.07.Tahun 2014	200.1.4/16-HAN/Bakesbang pol 3 juli 2025	Aktif
17	Pengurus Cabang Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Kabupaten Tanah Laut	Kebudayaan	Agib Eko Prasetyo,S.Pd,M.M	Hani Suryanti,S.M	Kasmin	08134 94010 70	Nomor : 331-I/SK/PP-PSHT/VI/2024	2022	2027	Jl. Terate Dusun Katunun Rt 09 Dusun III Kec.Pelaihari	Nomor AHU-0005248.AH.01.07.Tahun 2015	200.1.4/17-HAN/Bakesbang pol 7 Agustus 2025	Aktif
18	Komisi Cabang Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP.K-P-K)	Sosial Kemanusiaan, Sosial Kemasyarakatan, Nasionalis	H.Iswandi .HD	Masturi,SE	Agus Wedy	08235 87955 77	Nomor : N50-55.283/SK.Rev2-KC/KOMNAS/LP.K-P-K/04.2025	2023	2026	JL. A.Yani RT.002/001 Desa Kintapura	Nomor AHU-0000111.AH.01.08.Tahun 2023	200.1.4/18-HAN/Bakesbang pol 1 September 2025	Aktif
19	Paguyuban Lembur Kuring Tanah Laut	Pemberdayaan Masyarakat	H. Herry Winardi	Dadang Sugianto. S.Pd.I	Ati Normayanti.S.IP	08225 05119 19	Nomor : 34/SK-Ket/PLK-TL/X/2004	2024	2029	Jalan Kolonel Soepirman 100 RT.07 RW.02 Desa Atu-Atu, Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut 70815	NOMOR AHU-0001265.AH.01.07.TAHUN 2025	200.1.4/19-HAN/Bakesbang pol 2 Oktober 2025	Aktif

N TANAH LAUT

Tabel 3. 10 Rincian hibah Organisasi Masyarakat Tahun 2025

Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kab. Tanah Laut	112.500.000
DPC Persatuan Purnawirawan dan warakauri TNI Polri (Pepabri) Kab. Tanah Laut	40,500,000.00
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab. Tanah Laut	45,000,000.00
Sentra Komunikasi Mitra Polri (Senkom Polri) Kab. Tanah Laut	45,000,000.00
Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) DPC Santa Theresia Pelaihari	27,000,000.00
DPC Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kab. Tanah Laut	40,500,000.00
Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (KAHMI) Kab Tanah Laut	45,000,000.00
Majelis Pengurus Daerah Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia Organisasi Daerah Kab. Tanah Laut	67,500,000.00
Jumlah	310,500,000.00

Sumber: DPA Badan Kesbangpol TA 2025

4. Peningkatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi sosial agama dan budaya

1. Melaksanakan aksi P4GN melalui sidak/raja pada tempat hiburan malam bersama dengan BNN, Keploisian, Satpol PP, deteksi dini dengan cara pemeriksaan urin narkoba kepada ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan masyarakat yang ada ditempat hiburan di Tanah Laut.
2. Membentuk Perda tentang Fasilitasi Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan zat aditif lainnya.
3. Pembentukan satgas internal anti narkoba di seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
4. Tes Urine Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut

Tes urine dilakukan untuk menjalankan Peraturan Daerah No: 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tanah Laut yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tanah Laut. Tes urine dilakukan

kepada pejabat eselon dua, tiga dan empat , serta pejabat fungsional. Sekitar 500 orang menjadi sasaran dalam program ini. Tes urine dilaksanakan untuk mendeteksi dini penggunaan narkoba di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yakni;

1. Dengan cluster Test Urine Bagi ASN (Staff PNS/PPPK) Tahun 2025
2. Test Urine Bagi Peserta Calon Paskibraka dan Pendamping Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025
3. Test Urine bagi masyarakat



Gambar 3.17 Kegiatan Tes Urine Tahun 2025

5. Peningkatan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan

1. Pembentukan dan Pemusatan Diklat Paskibraka

Pada kegiatan ini jumlah peserta yang direkrut sebagai Paskibraka Tingkat Kabupaten Tanah Laut berasal dari siswa-siswi SLTA/ sederajat. Seleksi Paskibraka yang dilaksanakan kemudian membentuk 40 orang Paskibraka terpilih. Disamping itu pada tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut mengirimkan 6 (enam) orang siswa dari SLTA di Kabupaten Tanah Laut untuk mengikuti seleksi Paskibra Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus menjadi utusan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, dimana siswa SLTA yang lulus seleksi Paskibra Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus menjadi utusan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebanyak 3 (tiga) orang siswa.

Pada pelaksanaan kegiatan ini melibatkan berbagai unsur yang ada di Kabupaten Tanah Laut antara lain perangkat daerah terkait dilingkungan Pemkab. Tanah Laut dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut selaku pihak penyelenggara pendidikan Paskibraka Kabupaten Tanah Laut. Untuk keterlibatan pihak eksternal yaitu Kodim 9001/Tanah Laut, Polres Tanah Laut dan organisasi PPI Kabupaten Tanah Laut sebagai unsur pendidik dan pelatih pada tahap pembentukan sekaligus keterlibatan instansi tersebut pada saat penugasan pada pelaksanaan upacara peringatan HUT RI. Keterlibatan unsur utama lain pada kegiatan ini adalah pihak SLTA yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut selaku pihak yang mengirim anggota Paskibraka. Sedangkan keterlibatan instansi lainya pada pemerintah pusat yaitu BPIP RI selaku pembina Paskibraka Tingkat Nasional.

Selain melaksanakan pembentukan dan pemusatan diklat Paskibraka, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga menyelenggarakan Sosialisasi serta Penjaringan Paskibraka. Kegiatan Sosialisasi dan Penjaringan Paskibraka di Kabupaten Tanah Laut merupakan kegiatan dalam mengenalkan kegiatan kepaskibrakaan kepada para pelajar. Kegiatan ini juga menjadi motivasi bagi peserta untuk mempersiapkan diri agar dapat mengikuti seleksi Paskibraka di tingkat Kabupaten.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut juga menyelenggarakan lomba Paskibraka Tingkat Kabupaten Tanah Laut yang diikuti oleh Pelajar SLTA/Sederajat se-Kabupaten Tanah Laut. Kegiatan

Lomba Paskibra Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 merupakan ajang prestasi anggota Paskibra di Sekolah dan menjadi tolak ukur pembinaan Paskibra di Sekolah agar lebih berkualitas sehingga diharapkan kedepannya akan menjadi kader dalam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka baik ditingkat Kabupaten, Propinsi maupun di Tingkat Nasional.



Gambar 3.6
Pemusatan Diklat Paskibraka

2. Pembagian Bendera Merah Putih

Kegiatan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2025 berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 400.10.1.1/3823/SJ tanggal 15 Juli 2025 tentang Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2025 dalam rangka menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 Tahun 2025. Kegiatan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kegiatan dalam rangka meningkatkan semangat

nasionalisme dan cinta tanah air.

Kegiatan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut Bendera telah mengumpulkan Bendera Merah Putih dari sumbangan seluruh SKPD, BUMN, BUMD, Partai politik, Organisasi kepemudaan, Organisasi Masyarakat, Sekolah dan Masyarakat dengan jumlah sekitar 10.495 (Sepuluh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Lima) lembar.

Kegiatan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan dengan agenda kegiatan yaitu :

- Penganjangan Kegiatan Pembagian Bendera Merah Putih pada tanggal 4 Agustus 2025 di halaman Kantor Bupati Tanah Laut.
- Pembagian Bendera Merah Putih di mulai tanggal 04 Agustus s.d. 15 Agustus 2025.



Gambar 3.7. Politik Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih

3. Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Kegiatan Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tanah Laut merupakan kegiatan dalam mengenalkan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) kepada masyarakat untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan antara RAS, Suku, Agama dan Etnis di kalangan masyarakat. Kegiatan Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tahun 2025 Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan di 5 (lima) Kecamatan dengan Peserta Kegiatan Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tahun 2025 terdiri atas Kepala Desa, Aparat Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Budaya



Gambar 3.8
Sosialisasi Forum Pembauran Kebangsaan

4. Kegiatan Bina Bela Negara

Kegiatan Bina Bela Negara (BBN) Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Kegiatan ini juga berhasil dalam membentuk dan mengembangkan karakter yang tangguh, disiplin, tanggung jawab, ketahanan fisik dan mental serta menambah pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan.

Kegiatan Bina Bela Negara (BBN) Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut dilaksanakan pada Tanggal 5 s.d 7 Desember 2025 di SMA PGRI Pelaihari.

Peserta Kegiatan Bina Bela Negara (BBN) Tahun 2025 berjumlah 185 orang perwakilan dari sekolah di wilayah Kabupaten Tanah Laut hasil dari penjaringan sementara Calon Paskibraka dan Tim Lapangan Kegiatan Bina Bela Negara (BBN) Tahun 2025 di Kabupaten Tanah Laut terdiri dari :

- Kwatir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tanah Laut.
- DPPI / Purna Paskibraka Kabupaten Tanah Laut.

- Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Tanah Laut.
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut



Gambar 3.9
Kegiatan Bina Bela Negara

5. Pagelaran Budaya “Silaturahmi Antar Etnis/ Suku Di Bumi Tuntung Pandang Tahun 2025”

Kegiatan Pagelaran Budaya “Silaturahmi Antar Etnis/ Suku di Bumi Tuntung Pandang” di Kabupaten Tanah Laut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam mengembangkan dan melestarikan Kebudayaan Nusantara kepada masyarakat di Kabupaten Tanah Laut. Melalui kegiatan Pagelaran Budaya dapat mempererat tali persaudaraan dan persatuan antar masyarakat serta menumbuhkan rasa saling menghargai perbedaan kebudayaan.

Peserta Kegiatan Pagelaran Budaya “Silaturahmi Antar Etnis/ Suku di Bumi Tuntung Pandang” di Kabupaten Tanah Laut diisi oleh 5 Group Kesenian. Adapun nama-nama peserta Kegiatan dalam kegiatan tersebut yaitu:

Tabel 3.7

Daftar Peserta Pagelaran Budaya Tahun 2025

NO	NAMA	Nama Grup
1	Bagus Putra Christianto	Gandrung Anggun Sekar Taji
2	An Nisa Fitri	Sanggar Seni Tirta Kesuma

3	Ari Santoso	Sanggar Lestari Budaya Bangsa
4	Roselina Kesuma	Oche Galeri
5	Ratna Darmi Ningsih	Perguruan Kuntau

Sumber: Badan Kesbangpol 2025

Tim Lapangan Kegiatan Silaturahmi Antar Etnis/ Suku di Kabupaten Tanah terdiri dari :

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut sebagai Pelaksana Kegiatan.
2. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kabupaten Tanah Laut sebagai Pelaksana Kegiatan.
3. Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) Kabupaten Tanah Laut sebagai Pelaksana Kegiatan.



Gambar 3.10
Pagelaran Budaya

Faktor Pendorong/Keberhasilan

1. Terjadi penurunan potensi konflik sosial, dimana tahun 2023 terjadi 5 kasus sedangkan pada tahun 2024 dan 2025 terjadi 2 potensi konflik. Hal ini tidak terlepas dari upaya banyak pihak baik di masyarakat, kecamatan, maupun pihak-pihak yang tergabung dalam Timdu Penanganan Konflik Sosial dalam menangani atau memediasi potensi konflik di masyarakat.
2. Memperkuat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tanah Laut dan FKUB Kecamatan, FKUB adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.
3. Penyuluhan pembinaan kepada desa-desa tentang desa peduli toleransi.
4. Penyuluhan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
5. Penyuluhan tentang peraturan pendirian rumah ibadah.
6. Penyuluhan peraturan tentang organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Tanah Laut.
7. Peluncuran aplikasi SiLAPOR-Ormas yang berfungsi sebagai sarana dan interaksi Ormas dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Sosialisasi Pendidikan Politik dan pengembangan etika serta budaya politik yang adil, jujur dan damai
9. Bekerja sama dengan Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat.
10. Memperkuat fungsi Forum Pembauran Kebangsaan dalam bentuk sosialisasi maupun pagelaran budaya untuk melestarikan ragam budaya dan memperkuat rasa cinta tanah air.
11. Pemberian pemahaman tentang konsep bela negara, kepemimpinan dan Pancasila kepada pelajar melalui Kemah Bela Negara.
12. Meningkatkan fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (Kecamatan) dan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (Kabupaten) dalam menjangkau informasi mengenai potensi ancaman, gangguan serta hambatan di masyarakat.

13. Melibatkan instansi vertikal dalam memediasi konflik yang terjadi.
14. Kabupaten Tanah Laut mendapat penganugerahan penghargaan indeks Harmoni Indonesia (Ihai) Tahun 2025 dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.



Faktor Penghambat/Kegagalan

NO.	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Masih rendahnya akuntabilitas pada Badan Kesbangpol	Masih adanya kasus/temuan akuntabilitas pada Badan Kesbangpol	Belum optimalnya pelayanan administrasi perkantoran
			Belum optimalnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur
			Belum optimalnya peningkatan disiplin aparatur
			Belum optimalnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
			Belum optimalnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
			Belum terpenuhinya jumlah SDM
2	Legalitas Organisasi Kemasyarakatan belum terpenuhi	Belum seluruhnya Organisasi Masyarakat mendaftarkan serta melaporkan keberadaannya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Rendahnya pemahaman organisasi terhadap aturan tentang Organisasi Kemasyarakatan
3	Masih adanya penyalahgunaan Narkoba;	Rendahnya pengetahuan terkait bahaya penyalahgunaan narkoba	Masyarakat enggan melaporkan dalam hal adanya indikasi penyalahgunaan narkoba

NO.	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
4	Belum terwujudnya pemahaman wawasan kebangsaan	Masih adanya perilaku masyarakat yang intoleran	Pelaksanaan bela negara belum optimal;
			Belum optimalnya pembauran kebangsaan
5	Menurunnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.	Rendahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Ideologi Pancasila di masyarakat	Merosotnya kecintaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa khususnya di kalangan generasi muda
		Rendahnya pemahaman tujuan pencapaian 4 konsensus dasar di kalangan Generasi Muda/Pelajar	Belum maksimalnya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan 4 Konsensus Dasar
		Rendahnya pemahaman masyarakat terkait aturan tentang pendirian rumah ibadah	Terdapat gejala intoleran antar umat beragama dan intern umat beragama
6	Sinergitas Koordinasi Kewaspadaan Dini Daerah belum maksimal	Belum maksimalnya fungsi Kewaspadaan Dini Daerah	Rendahnya pemahaman Kewaspadaan Dini Daerah
			Pemahaman kewaspadaan dini di level masyarakat belum terbangun dengan baik
7	Partisipasi Politik Masyarakat belum maksimal	Belum optimalnya sosialisasi, desiminasi terkait dengan Pendidikan Politik	Minimnya media/forum untuk pendidikan politik
			Fasilitas bagi Parpol, LSM, Ormas dan Nirlaba yang merupakan bagian dari Infrastruktur Politik masih minim yang mengakibatkan Proses pendewasaan Politik masyarakat relatif lambat
8	Belum terselesaikannya masalah kerawanan sosial	Masih adanya kasus kerawanan sosial yang disebabkan oleh ekonomi dan budaya	Adanya kasus sengketa lahan
			Adanya konflik yang disebabkan perbedaan budaya antara warga asli dan warga pendatang

Alternatif Solusi/Rencana Aksi yang Akan Dilakukan

Rencana Aksi kedepan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tanah Laut agar tidak terjadi konflik sosial dan konflik antarumat beragama :

- 1) Melakukan tindakan preventif pencegahan konflik
- 2) Mendeteksi secara dini potensi-potensi terjadinya konflik
- 3) Melaksanakan Program Kegiatan Penyuluhan
- 4) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama.
- 5) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
- 6) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat.
- 7) Menampung aspirasi organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan aspirasi masyarakat.
- 8) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragaman

dan pemberdayaan masyarakat.

- 9) Menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati.
- 10) Melaporkan hasil kegiatan yang berkenaan dengan konflik social dan konflik antar umat beragama di wilayah Kabupaten Tanah Laut kepada Bupati Tanah Laut.
- 11) Melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan yang telah ada secara maksimal dan menambah kuantitas dan kualitas pelaksanaan sosialisasi melalui kegiatan BELA DESA yang dilaksanakan setiap bulan dengan materi terkait toleransi kehidupan umat beragama.

Sebagai upaya meningkatkan capaian kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut ke depan, ada beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan komitmen antar Bidang pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dalam penerapan manajemen berbasis kinerja, khususnya dalam perencanaan kinerja maupun monitoring dan evaluasi capaian kinerja.
- 2) Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada outcome sehingga tujuan dan sasaran pada Badan Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut dapat tercapai. Melakukan koordinasi yang intensif serta meningkatkan kolaborasi antar bidang yang berada dalam lingkungan
- 3) Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan
- 4) Optimalisasi pelayanan internal maupun kepada masyarakat dengan menggunakan pengembangan teknologi (aplikasi/web).
- 5) Membangun sinergitas antara Badan Kesbangpol dengan Lembaga Vertikal.

Dalam mencapai sasaran Terjaganya Stabilitas Kehidupan Masyarakat di dukung oleh Program Penunjang dengan pagu senilai Rp. 5,912,845,317,- dan Realisasi Sebesar Rp. 5,439,958,515,-.

Tabel 3.1.4
Realisasi Program Penunjang

No	Program	Pagu	Realisasi
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,912,845,317	5,439,958,515
JUMLAH			

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian kinerja berdasarkan perbandingan antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang diperoleh. Efisiensi kinerja diukur menggunakan rumus berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E : Efisiensi
 PAKi : Pagu anggaran keluaran i
 RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
 CKi : Capaian keluaran i

$$\text{Efisiensi} = \frac{(13,227,928,201.86 \times 100\%) - 11,743,569,646}{(13,227,928,201.86 \times 100\%)} \times 100\%$$

$$\text{Efisiensi} = 11,22\%$$

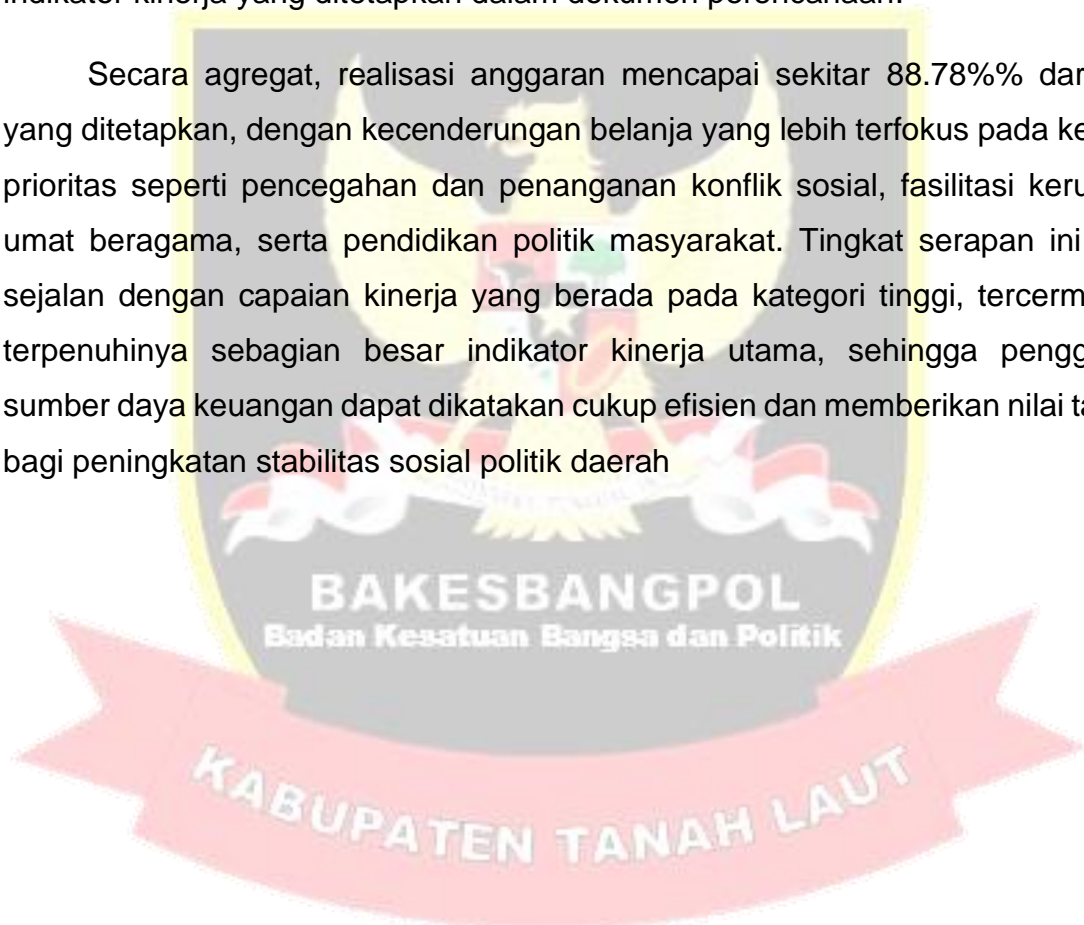
Tabel 3.1.5
Efisiensi Sasaran Strategis 1

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	88,78%	11,22%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengelolaan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut selama Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan daerah. Realisasi belanja diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, khususnya terjaganya stabilitas kehidupan masyarakat serta penguatan wawasan kebangsaan, sehingga setiap program dan kegiatan yang dibiayai APBD memiliki kontribusi langsung terhadap indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Secara agregat, realisasi anggaran mencapai sekitar 88.78%% dari pagu yang ditetapkan, dengan kecenderungan belanja yang lebih terfokus pada kegiatan prioritas seperti pencegahan dan penanganan konflik sosial, fasilitasi kerukunan umat beragama, serta pendidikan politik masyarakat. Tingkat serapan ini dinilai sejalan dengan capaian kinerja yang berada pada kategori tinggi, tercermin dari terpenuhinya sebagian besar indikator kinerja utama, sehingga penggunaan sumber daya keuangan dapat dikatakan cukup efisien dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan stabilitas sosial politik daerah



TUJUAN I

Tabel 3.6

Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Harmonis dan Bertoleransi yang Berlandaskan Pancasila

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Program				
						Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase	
							Rp	Rp	%	
1	Terjaganya stabilitas kehidupan masyarakat	1	Persentase gangguan/ stabilitas kehidupan masyarakat yang terselesaikan	100%	100%	1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2,572,153,643	2,148,893,260	83.54
						2	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2,379,222,783	2,370,222,630	99.62
						3	Program Pemberdayaan	689,334,225	584,972,912	84.86

							Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			
						4	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	456,366,610	299,650,835	65.66
						5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1,218,005,624	899,871,494	73.88

KABUPATEN TANAH LAUT

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	13,227,928,201.86	11,743,569,646.00	88.78	19,970,284,678.00
5.1	BELANJA OPERASI	12,969,953,224.07	11,548,528,806.00	89.04	19,524,879,869.00
5.1.01	Belanja Pegawai	4,777,085,000.00	4,444,682,299.00	93.04	4,356,215,739.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,341,585,000.00	2,215,201,371.00	94.60	2,186,992,061.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,435,500,000.00	2,229,480,928.00	91.54	2,169,223,678.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,533,044,224.07	4,445,325,189.00	80.34	4,809,566,223.00
5.1.02.01	Belanja Barang	2,028,196,512.15	1,433,013,016.00	70.65	1,570,404,787.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1,751,286,711.92	1,598,229,834.00	91.26	1,445,638,947.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	243,500,000.00	235,834,150.00	96.85	222,702,459.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,446,061,000.00	1,114,248,189.00	77.05	1,518,320,030.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	64,000,000.00	64,000,000.00	100.00	52,500,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	2,659,824,000.00	2,658,521,318.00	99.95	10,359,097,907.00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00	0.00	7,912,926,600.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	423,000,000.00	422,265,000.00	99.83	300,178,740.00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2,236,824,000.00	2,236,256,318.00	99.97	2,145,992,567.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	12,969,953,224.07	11,548,528,806.00	89.04	19,524,879,869.00
5.2	BELANJA MODAL	257,974,977.79	195,040,840.00	75.60	445,404,809.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	230,224,977.79	168,789,340.00	73.31	201,168,400.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	74,312,023.50	61,200,340.00	82.36	141,113,400.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	62,653,284.00	21,544,000.00	34.39	26,580,000.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1,700,000.00	1,650,000.00	97.06	0.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	91,559,670.29	84,395,000.00	92.17	33,475,000.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	244,236,409.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0.00	0.00	0.00	244,236,409.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	27,750,000.00	26,251,500.00	94.60	0.00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	27,750,000.00	26,251,500.00	94.60	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	257,974,977.79	195,040,840.00	75.60	445,404,809.00
	JUMLAH BELANJA	13,227,928,201.86	11,743,569,646.00	88.78	19,970,284,678.00

	SURPLUS/DEFISIT	(13,227,928,201.86)	(11,743,569,646.00)	88.78	(19,970,284,678.00)

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Tanah Laut

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan 2024

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	13,227,928,201.86	11,743,569,646.00	19,970,284,678.00
5.1	BELANJA OPERASI	12,969,953,224.07	11,548,528,806.00	19,524,879,869.00
5.1.01	Belanja Pegawai	4,777,085,000.00	4,444,682,299.00	4,356,215,739.00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2,341,585,000.00	2,215,201,371.00	2,186,992,061.00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2,435,500,000.00	2,229,480,928.00	2,169,223,678.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5,533,044,224.07	4,445,325,189.00	4,809,566,223.00
5.1.02.01	Belanja Barang	2,028,196,512.15	1,433,013,016.00	1,570,404,787.00
5.1.02.02	Belanja Jasa	1,751,286,711.92	1,598,229,834.00	1,445,638,947.00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	243,500,000.00	235,834,150.00	222,702,459.00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	1,446,061,000.00	1,114,248,189.00	1,518,320,030.00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	64,000,000.00	64,000,000.00	52,500,000.00
5.1.05	Belanja Hibah	2,659,824,000.00	2,658,521,318.00	10,359,097,907.00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	0.00	0.00	7,912,926,600.00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	423,000,000.00	422,265,000.00	300,178,740.00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2,236,824,000.00	2,236,256,318.00	2,145,992,567.00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	12,969,953,224.07	11,548,528,806.00	19,524,879,869.00
5.2	BELANJA MODAL	257,974,977.79	195,040,840.00	445,404,809.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	230,224,977.79	168,789,340.00	201,168,400.00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	74,312,023.50	61,200,340.00	141,113,400.00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	62,653,284.00	21,544,000.00	26,580,000.00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1,700,000.00	1,650,000.00	0.00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	91,559,670.29	84,395,000.00	33,475,000.00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0.00	0.00	244,236,409.00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	0.00	0.00	244,236,409.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	27,750,000.00	26,251,500.00	0.00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	27,750,000.00	26,251,500.00	0.00
	JUMLAH BELANJA MODAL	257,974,977.79	195,040,840.00	445,404,809.00
	JUMLAH BELANJA	13,227,928,201.86	11,743,569,646.00	19,970,284,678.00
	SURPLUS/DEFISIT	(13,227,928,201.86)	(11,743,569,646.00)	(19,970,284,678.00)

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Tanah Laut



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2025 merupakan laporan pertanggungjawaban tahun pertama terhadap Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 64 Tahun 2025 .

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator adalah 100% dengan tingkat capaian kinerja berkategori **Sangat Tinggi** dengan rentang capaian lebih dari 91%.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Upaya-upaya yang akan dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka peningkatan kinerja sebagai berikut:

1) Penguatan sistem deteksi dini dan penanganan konflik sosial

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut akan memperkuat sistem deteksi dini dan penanganan konflik sosial melalui optimalisasi jejaring kewaspadaan dini, peningkatan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah terkait, kecamatan, dan pemerintah desa/kelurahan, serta pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan pelaporan kejadian di lapangan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat respons terhadap potensi konflik sehingga dapat segera difasilitasi penyelesaiannya secara damai.

2) Peningkatan kapasitas aparatur

Peningkatan kapasitas aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan dilakukan melalui bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan teknis yang berfokus pada

pengelolaan kinerja, mediasi dan resolusi konflik, penguatan wawasan kebangsaan, serta penyusunan laporan kinerja yang memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas. Peningkatan kapasitas ini diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih profesional, responsif, dan berintegritas

3) Optimalisasi peran forum-forum strategis

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan mengoptimalkan peran forum-forum strategis seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan forum dialog kebangsaan sebagai wahana komunikasi, edukasi, dan penyelesaian permasalahan secara partisipatif dan konstruktif. Melalui penguatan peran forum-forum tersebut, diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

4) Penyempurnaan perencanaan dan penganggaran kinerja

Penyempurnaan kualitas perencanaan dan penganggaran kinerja akan dilakukan dengan memperkuat keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatan, serta alokasi sumber daya sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Penajaman indikator kinerja dan target yang terukur akan menjadi perhatian dalam siklus perencanaan berikutnya.

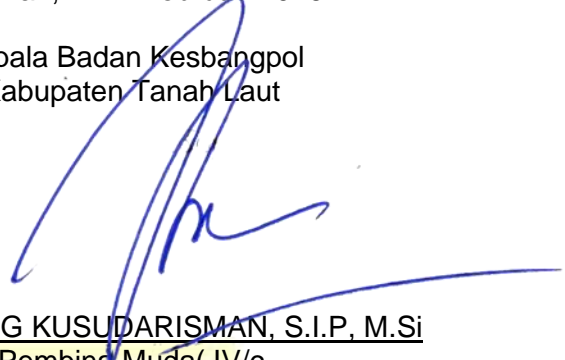
5) Peningkatan kualitas data dan pelaporan kinerja

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga akan meningkatkan kualitas data dan pelaporan kinerja melalui penataan dan pemutakhiran basis data secara berkala, pemanfaatan sistem informasi kinerja, serta penerapan mekanisme penjaminan mutu (quality assurance) terhadap dokumen laporan kinerja. Dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut diharapkan dapat disusun secara lebih tepat

waktu, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaihari, Februari 2026

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut



H. BAMBANG KUSUDARISMAN, S.I.P, M.Si
Pembina Muda(IV/c
19680818 199010 1 003



waktu, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaihari, 27 Februari 2026

Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Tanah Laut



H. BAMBANG KUSUDARISMAN, S.I.P, M.Si

Pembina Muda (IV/c)
19680818 199010 1 003

